

PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA, FILSAFAT, PSIKOLOGI, DAN SOSIOLOGI

Istanto

Universitas Islam Nusantara Bandung
E-mail: istantoskhay@gmail.com

Mulyono

Universitas Islam Nusantara Bandung
E-mail: mulyonomtsmmm@gmail.com

Muhammad Al Mighwar

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: malmighwar@gmail.com

Ujang Nurjaman

Universitas Islam Nusantara Bandung
E-mail: ujangn61@gmail.com

Received	Revised	Accepted
17 Desember 2021	4 January 2022	17 January 2022

EDUCATION MANAGEMENT BASED ON RELIGION, PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY, AND SOCIOLOGY

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze what, why, and how of education management based on religion, philosophy, psychology, and sociology. From this research, it was concluded that education management is planning, implementing, and supervising educational resources which are: (1) based on religion means based on God's teachings that command comprehensive arrangements, by means of proper and accurate planning, implementation, and supervision; (2) based on philosophy means based on a realistic study of nature and the meaning of life, by thinking rationally, naturally scientifically, harmoniously, and critically; (3) based on psychology means based on a comprehensive scientific study of the human mind and behavior, by means of introspection, experimentation, and comparison; and (4) based on sociology means based on social scientific studies that require progress, with a progressive, rational, and conscious society perspective.

Keywords: *Education Management; Religion; Philosophy; Psychology; Sociology*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa, mengapa, dan bagaimana pengelolaan pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa pengelolaan pendidikan adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya pendidikan yang dengan: (1) berbasis agama berarti berpijak pada ajaran Tuhan yang mewajibkan pengaturan yang menyeluruh, dengan cara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang tepat dan akurat; (2) berbasis filsafat berarti berpijak pada kajian alam dan makna kehidupan yang realistis, dengan cara berpikir rasional, natural ilmiah, harmoni, dan kritis; (3) berbasis psikologi berarti berpijak pada kajian ilmiah pikiran dan perilaku manusia yang menyeluruh, dengan cara introspeksi, eksperimen, dan komparasi; dan (4) berbasis sosiologi berarti berpijak pada kajian ilmiah kemasyarakatan yang menghendaki kemajuan, dengan cara pandang masyarakat yang progresif, rasional, dan sadar.

Kata Kunci: *Pengelolaan Pendidikan; Agama; Filsafat; Psikologi; Sosiologi*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pendidikan merupakan amanat para pendiri bangsa (*founding fathers*) yang memiliki dasar yang sangat kuat dalam dasar Negara Republik Indonesia (NRI), yang diatur dalam satu bab dan dua pasal tersendiri. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (UUD NRI '45), BAB XIII tentang PENDIDIKAN menyatakan pada Pasal 31 ayat (1) "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, ayat (2) "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang", dan Pasal 32 "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional".

Dengan demikian, pendidikan dan kebudayaan adalah hak setiap warga negara dan kewajiban pemerintah untuk mengusahakan, menyelenggarakan, dan memajukannya sebagai pengemban amanat negara untuk melayani warganya (*public service obligation*) dalam rangka melindungi, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI '45.

Sebagai pelaksanaan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI '45, tersusunlah Undang-Undang 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN 20/2003) yang saat ini berlaku. Dalam UUSPN 20/2003 ini, pengertian, fungsi, dan tujuan Diknas dinyatakan secara tegas. Perihal pengertiannya, Pasal 3 1 ayat (1) menegaskan "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara". Terkait fungsi dan tujuannya, Pasal 3 menegaskan "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pengertian, fungsi dan tujuan Diknas dalam UUD NRI '45 dan UUSPN 20/2003 tersebut sejalan dengan gagasan inti tokoh pendidikan nasional sekaligus salah satu penyusun UUD NRI '45 yang tergabung dalam Panitia Sembilan, yaitu Ki Hajar Dewantara (1977), yang memaknai bahwa pendidikan secara umum adalah “daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual dan tubuh anak); dalam Taman Siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya”.¹ Hal ini ditegaskan lagi pada Pasal 1 ayat (16) UUSPN 20/2003 “Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat”.

Untuk pencapaian tujuan Diknas tersebut, Pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai kriteria minimal yang wajib dipenuhi dan dilampaui pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Pasal 35 UUSPN 20/2003 menetapkan bahwa SNP meliputi delapan aspek, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. SNP diatur lebih rinci dalam PP 19/2005 tentang SNP yang selanjutnya diubah dengan PP 57/2021.

Menurut BSNP, delapan standar dikembangkan dan ditetapkan untuk mengukur, mengevaluasi, menilai mutu pendidikan, yang hasilnya akan menjadi acuan untuk menyusun program peningkatan mutu pendidikan. Memperhatikan kondisi pendidikan nasional yang sangat beragam, SNP dipastikan bukan untuk penyeragaman tetapi justru untuk mengakomodir keberagaman, supaya pendidikan tetap dalam standar mutu sehingga setiap satuan pendidikan memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan bermutu.²

Dalam PP 19/2005 tentang SNP yang kemudian diubah dengan PP 57/2021 tersebut dijelaskan bahwa: (1) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu; (2) Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan; (3) Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; (4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria

¹<https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/sistem-pendidikan-nasional-dan-permasalahannya/>

² Faridah Alawiyah, “Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah”, Jurnal Aspirasi Vol. 8 No. 1, Juni 2017.

pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan; (5) Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (6) Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan; (7) Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan (8) Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.³

Dari delapan SNP tersebut, standar pengelolaan termasuk standar yang sangat menentukan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Pasal 27 ayat (1) PP 57/2021 menyatakan “Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif”. Standar Pengelolaan meliputi (1) Standar pengelolaan oleh satuan Pendidikan; (2) Standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah; dan (3) Standar pengelolaan oleh Pemerintah.⁴ Dengan demikian, pengelolaan pendidikan di Indonesia harus mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau oleh Penyelenggara Pendidikan untuk instansi swasta. Misalnya, pengelolaan pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan menengah harus mengacu pada Permendiknas 19/2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan,⁵ sebagaimana termaktub pada Pasal 1 ayat (1) “Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional”. Standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah dalam Permendiknas 19/2007 nampak dalam tabel berikut.

A	Perencanaan Program	1. Visi Sekolah/Madrasah 2. Misi Sekolah/Madrasah 3. Tujuan Sekolah/Madrasah 4. Rencana Kerja Sekolah/Madrasah
B	Pelaksanaan Rencana Kerja	1. Pedoman Sekolah/Madrasah 2. Struktur Organisasi Sekolah/Madrasah 3. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah/Madrasah 4. Bidang Kesiswaan

³ Halik S. Maranting dkk, “Implementasi Standar Nasional Pendidikan Dalam Meningkatkan Daya Saing Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Gorontalo, ”TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 8, Nomor 2 : Agustus 2020.

⁴ Permendiknas RI 19/2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Tersedia online: https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Pendidikan#cite_note-21

⁵ Siti Zenab, “Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah Dasar”, Jurnal Menata: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 4 No. 1 (2021).

		5. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran 6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Bidang Sarana dan Prasarana 8. Bidang Keuangan dan Pembiayaan 9. Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah
C	Pengawasan dan Evaluasi	1. Program Pengawasan 2. Evaluasi Diri 3. Evaluasi dan Pengembangan KTSP 4. Evaluasi Pendetayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Akreditasi Sekolah/Madrasah
D	Kepemimpinan Sekolah/Madrasah	Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah/madrasah
E	Sistem Informasi Manajemen	Pengelolaan sistem informasi manajemen yang memadai di sekolah/madrasah
F	Penilaian Khusus	Pengakuan Pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP terhadap sekolah/madrasah yang pengelolaannya tidak mengacu pada SNP

Tabel 1. Pengelolaan pendidikan Dasar dan Menengah

Dengan adanya berbagai payung regulasi beserta pedoman teknisnya diharapkan pengelolaan pendidikan semakin berkualitas sehingga tujuan Diknas segera terwujud. Sebab, Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu bangsa semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusianya yang memiliki daya saing lokal, regional dan global dalam berbagai profesi, seperti para intelektual, politisi, ilmuwan, negarawan, guru dan profesi lainnya⁶. Oleh karena itu, poin penting pengelolaan pendidikan oleh pemerintah dari masa ke masa mengacu pada peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang pendidikan.

Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai inovasi dalam sistem dan proses pendidikan nasional. Sayangnya, ternyata masalah pendidikan masih ada akibat dari perkembangan dan tuntutan zaman. Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud,⁷ mengakui masih adanya beberapa permasalahan dalam pengelolaan pendidikan, antara lain: (1) Pemerataan pendidikan, seperti masalah belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana di daerah-daerah terutama di daerah terpencil; (2) Relevansi pendidikan, seperti belum relevannya kurikulum dengan tuntutan dunia kerja dan kemajuan IT, meskipun pemerintah telah meluncurkan program *STEAM (Sains, Teknologi, Engenering, Art and Mathematic)* untuk pembelajaran daring, selain luring; (3) Kualitas pendidikan, seperti masih rendahnya kualitas pendidikan Indonesia, sebagaimana rilis *The Guardian* bahwa Indonesia menempati urutan ke 57 dari total 65 negara, dimana peringkat tersebut menentukan negara mana yang terbaik dari segi membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Padahal, pemerintah telah meluncurkan beragam program strategis seperti Gerakan Literasi Nasional,

⁶https://www.kompasiana.com/heryizkak7272/5e0eb672d541df4d837854f3/beberapa-masalah-besar-dalam-dunia-pendidikan-di-indonesia?page=all&page_images=1

⁷<https://ayoguruberbagai.kemdikbud.go.id/artikel/sistem-pendidikan-nasional-dan-permasalahannya/>

Pendidikan dengan pendekatan saintifik, *discovery learning*, *problem base solving* dalam pembelajaran; (4) Efisiensi pendidikan, seperti masih terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan anggaran pendidikan, tanpa memperhatikan skala prioritas yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan; dan (5) Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Diktendik), seperti masih kurangnya Diktendik yang KKI, CPNS dan PNS/ASN terkait dengan perubahan kurikulum dari KTSP ke K13, dari K13 ke K21 (merdeka belajar).

Mengapa masalah-masalah seperti masih muncul, padahal regulasi dan aturan teknisnya telah jelas dan anggaranpun tersedia 20 persen dari APBN, yakni sebesar 550 triliun. Mengacu pada gagasan Edward Sallis,⁸ kesuksesan pengelolaan pendidikan sangat tergantung pada kesadaran semua pihak. Lembaga pendidikan dituntut untuk mengembangkan pendekatan mereka sendiri terhadap kualitas, dan perlu menunjukkan kepada publik bahwa mereka juga dapat memberikan layanan berkualitas yang konsisten, *'This new consciousness of quality has now reached education; educational institutions are being required to develop their own approaches to quality, and need to demonstrate publicly that they too can deliver a consistent quality service'*.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, masalah demi masalah pengelolaan pendidikan memang akan selalu ada dan harus dicarikan solusinya satu per satu secara tepat, tidak dibiarkan berlarut-larut sampai menumpuk. Salah satu solusinya, selain berpedoman pada konsep dan teori para ahli, para pihak yang berkepentingan perlu dimunculkan kesadarannya akan ajaran/kaidah/prinsip kebenaran yang mereka anut yang bersumber dari agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa (*what*), mengapa (*why*), dan bagaimana (*how*) pengelolaan pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dengan teknik *library research*,⁹ dan data dianalisis dengan teknik *content analysis*¹⁰ terkait pengelolaan pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi.

HASIL dan PEMBAHASAN

Pengelolaan Pendidikan

Secara etimologis, kata 'pengelolaan' dalam bahasa Inggris disebut *management* yang menurut *Oxford Learner's Dictionary* berarti "*the activity of running*

⁸ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education* (Routledge, 2000: 24).

⁹ Muhammad Al Mighwar, "Penyusunan Dan Penyesuaian Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)": 36 https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/157

¹⁰Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi. Aksara, 1999); Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2005).

and controlling a business or similar”¹¹ dan kata ‘pendidikan’ disebut *education* yang berarti “*a process of teaching, training and learning, especially in schools, colleges or universities, to improve knowledge and develop skills*”.¹² Singkatnya, pengelolaan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan dan pengawasan proses pengajaran, pelatihan, dan pembelajaran.

Sedangkan terminologi pengelolaan pendidikan, dalam konteks Indonesia khususnya, dapat dilihat secara ringkas dan jelas dalam hasil penelitian disertasi Muhammad Al Mighwar di Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung tahun 2021 yang berjudul “Kepemimpinan Kiai Dalam Pengelolaan Pondok Pesantren Modern (Studi Historis Kepemimpinan K.H. Imam Zarkasyi Di Pondok Modern Darussalam Gontor).

Atas dasar pendapat para pakar *manajemen* seperti George R. Terry, Lipham dan Hoch, Engkoswara dan Mulyasa, serta regulasi Permendiknas 19/2007 tentang Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pelaksanaan PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Muhammad Al Mighwar menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan di Indonesia mencakup fungsi-fungsi POAC the 6 M’s / 7 komponen pendidikan. Fungsi-fungsi ini disintesiskannya menjadi tiga fungsi perencanaan/*planning*, pelaksanaan (pengorganisasian/*organizing* dan penggerakan/*actuating*) dan pengawasan/*evaluating* lima sumber daya/komponen pendidikan, yaitu: (1) *Man and Women*/Diktendik dan Kesiswaan; (2) *Materials and Methods*/Kurikulum dan Program Pengajaran; (3) *Machines*/sarana dan prasarana; (4) *Money/Keuangan*; (5) *Markets/Hubungan Masyarakat dan Layanan Khusus*. Detailnya: (1) Perencanaan meliputi: (a) Penyusunan Strategi, yang mencakup Visi, Misi, dan Tujuan; dan (b) Penyusunan Kebijakan, yang mencakup Rencana Kerja (Jangka Panjang, Jangka Menengah, Jangka Pendek), Pedoman-Pedoman Komponen Pendidikan (Kesiswaan, Kurikulum dan Program Pengajaran, Diktendik, Sarpras, Pembiayaan, Humas/Kemitraan dan Layanan Khusus); (2) Pelaksanaan meliputi (a) Pengorganisasian, yang mencakup Desain struktur organisasi formal beserta tupoksinya, dan Dinamisasi organisasi formal-nonformal-informal; dan (b) Penggerakan Komponen Pendidikan, yang mencakup Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, Motivasi, Penilaian, Pengembangan, Kompensasi, dan Komunikasi efektif; dan (3) Pengawasan meliputi: (1) Pengawasan Bertahap, yang mencakup Pemantauan, Supervisi, Evaluasi, Pelaporan, Tindak Lanjut; dan (2) Pengawasan Menyeluruh, yang mencakup Evaluasi Diri, dan Akreditasi/Penilaian Khusus.¹³

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diringkas bahwa pengelolaan pendidikan adalah pengaturan (perencanaan/*planning*, pelaksanaan (pengorganisasian/*organizing* dan penggerakan/*actuating*) dan pengawasan/*evaluating*) lima sumber daya/komponen pendidikan.

¹¹<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/management?q=management>

¹² <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/education>

¹³ Muhammad Al Mighwar, *Kepemimpinan Kiai Dalam Pengelolaan Pondok Pesantren Modern (Studi Historis Kepemimpinan K.H. Imam Zarkasyi Di Pondok Modern Darussalam Gontor)* (Bandung: Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Disertasi 2021: 108-109).

Selain terminologi pengelolaan pendidikan yang dihasilkan oleh para ahli dan peneliti tersebut, sebagai pelengkap atau alternatif rujukan tentunya masih diperlukan kajian terminologi lain merujuk pada basis-basis lainnya yang lebih fundamental, yaitu basis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi. Sebab, agama merupakan sumber kepercayaan/ajaran ketuhanan yang absolut, filsafat merupakan sumber cara berpikir dan memahami, psikologi merupakan sumber pengetahuan kejiwaan, dan sosiologi merupakan sumber pengetahuan kemasyarakatan yang semuanya terkait dengan manusia sebagai subjek dan objek didik, sebagaimana uraian berikut.

Pengelolaan Pendidikan Berbasis Agama

Secara etimologis, kata 'berbasis' dalam bahasa Inggris disebut *based on* yang menurut *Oxford Learner's Dictionary* berarti "to use an idea, a fact, a situation, etc. as the point from which something can be developed",¹⁴ sedangkan kata 'agama' disebut *religion* yang berarti "the belief in the existence of a god or gods, and the activities that are connected with the worship of them, or in the teachings of a spiritual leader".¹⁵

Dengan demikian, pengelolaan pendidikan berbasis agama adalah pengaturan lima sumber daya pendidikan berpijak pada ajaran Tuhan, terutama yang termaktub dalam ayat-ayat kitab suci.

Dalam disertasi Muhammad Al Mighwar¹⁶ disebutkan bahwa dalam agama Islam, pengelolaan dikenal dengan istilah *at-tadbir* yang artinya penertiban, pengaturan, atau pengurusan segala sesuatu secara *al-ihsan* (baik/tepat), yang dasarnya dapat merujuk pada dua dalil dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Saw.

Pertama, firman Allah Swt. Dalam QS. As-Sajdah : 5, "Dia mengatur (yudabbiru) urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu".

Mengacu pada Kamus Bahasa Arab "*Al-Munawwir*" dan pendapat Ramayulis, kata kunci (*keyword*) pengelolaan dalam ayat di atas adalah "*yudabbiru*" yang artinya "mengatur; mengurus" yang derivasinya adalah "*at-tadbir*" yang artinya "penertiban; pengaturan; pengurusan", sebagai bukti pengelolaan ilahi dalam keteraturan alam semesta ini, yang semestinya juga dilakukan oleh manusia sebagai hamba sekaligus wakil-Nya di muka bumi. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan pendidikan menurut Allah adalah pengaturan semua urusan secara komprehensif dengan cara: (1) perencanaan dan pelaksanaan sumber-sumber daya pendidikan, seperti terlihat kalimat "*Dia mengatur urusan dari langit ke bumi*"; dan (2) pengawasan/pelaporan periodik/sesuai waktu yang ditentukan, sebagaimana tergambar dari kalimat "*kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.*"

Kedua, hadits Nabi Saw. riwayat An-Nasa'i, "Sesungguhnya Allah Swt. mewajibkan perbuatan yang baik (*al-ihsan*) yang dilakukan secara baik dalam segala hal. Jika kamu membunuh binatang maka lakukanlah secara baik, jika kamu akan

¹⁴ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/base-on?q=base+on>

¹⁵ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/religion?q=religion>

¹⁶ Muhammad Al Mighwar, *Op. Cit.*: 28-29.

menyembelih maka sembelihlah secara baik; pertajamlah alat potongnya, kemudian istirahatkanlah binatangnya”.

Mengacu pada Kamus Bahasa Arab *Al-Munawwir*, kata kunci (*keyword*) yang relevan dengan pengelolaan dalam hadits di atas adalah “*al-ihsan*” yang artinya “hal berbuat baik” yang merupakan turunan dari kata “*ahsana*” yang artinya “berbuat baik; mengerti dengan baik” atau “secara tepat”. Dari kandungan hadits tersebut dapat dimengerti bahwa setiap manusia wajib melakukan perbuatan yang baik (bermanfaat) dalam segala hal dengan cara-cara yang baik (tepat dan akurat), yang dalam pengelolaan pendidikan dapat berarti pengaturan semua sumber daya pendidikan dengan cara: (1) tepat dan akurat perencanaannya, sebagaimana terlihat dari kalimat “*Jika kamu membunuh binatang maka lakukanlah secara baik*”; (2) tepat dan akurat pelaksanaannya, sebagaimana tercermin dalam kalimat “*jika kamu akan menyembelih maka sembelihlah secara baik*” dan kalimat “*pertajamlah alat potongnya*”; dan (3) tepat dan akurat pengawasannya, sebagaimana tercermin dalam kalimat “*pertajamlah alat potongnya*”.

Dari pembahasan agama di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan berbasis agama adalah pengaturan sumber daya pendidikan berpijak pada ajaran Tuhan yang mewajibkan pengaturan yang menyeluruh, yang dilakukan dengan cara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang tepat dan akurat.

Pengelolaan Pendidikan Berbasis Filsafat

Secara etimologis, kata ‘filsafat’ dalam bahasa Inggris disebut *philosophy* yang menurut *Oxford Learner’s Dictionary* artinya “*the study of the nature and meaning of the universe and of human life*”.¹⁷

Dengan demikian, pengelolaan pendidikan adalah pengaturan lima sumber daya pendidikan berpijak pada kajian alam dan makna kehidupan, termasuk produk pemikiran para ahli filsafat.

Realisme termasuk salah aliran filsafat pendidikan yang dapat dijadikan pijakan pengelolaan pendidikan, dengan tokohnya Kneller dan Frederick Breed, yang inti gagasannya adalah dunia rohani dan dunia materi merupakan hakikat yang asli dan abadi. Kneller membagi realisme menjadi dua, yaitu (1), Realisme rasional, yang memandang bahwa dunia materi adalah nyata dan berada di luar pikiran yang mengamatinya, terdiri dari realisme klasik dan realisme religius; (2), Realisme natural ilmiah, yang memandang bahwa dunia yang kita amati bukan produk kreasi akal manusia, tetapi dunia seperti adanya, dan substansialitas, sebab akibat, serta aturan-aturan alam merupakan suatu penampakan dari dunia itu sendiri. Frederick Breed menambahkan dua lainnya, yaitu: (3) Neo-realisme/harmoni, yang memandang bahwa pendidikan hendaknya harmoni dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu menghormati hak-hak individu; dan (4) Realisme kritis, berpijak pada pemikiran Immanuel Kant yang mensintesis pandangan berbeda antara empirisme dan rasionalisme, skeptisisme dan absolutisme, serta eudaemonisme dengan prutanisme untuk filsafat yang kuat.¹⁸

¹⁷ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/philosophy?q=philosophy>

¹⁸ Abdul Muiz Thbrani, *Filsafat Dalam Pendidikan* (Jember: IAIN Jember Press, 2015: 93).

Dalam Jurnal Mentari, Saiful¹⁹ menyatakan bahwa pokok pemikiran realisme adalah: (1) pengetahuan adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam riil. Hal ini tidak jauh berbeda seperti sebuah gambar hasil lensa kamera yang merupakan representasi dari gambar aslinya; (2) suatu teori dianggap benar jika betul-betul riil/nyata, dan secara substantif ada, dan memang benar, bukan menyajikan fiksi; (3) konsep filsafat menurut realisme adalah Metafisika-realisme, Humanologi-realisme; Epistemologi-realisme, Aksiologi-realisme; (4) Hakikat realitas adalah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani; dan (5) pendidikan lebih dihargai dari pada pengajaran sebab pendidikan mengembangkan semua potensi manusia.

Apabila filsafat pendidikan *Realisme* itu diterapkan dalam pengelolaan pendidikan, maka penggunaan empat cara pandangnya adalah: (1) Realisme rasional, yakni pengelolaan pendidikan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan hendaknya merujuk pada data-data nyata yang terjadi di lapangan, misalnya data akurat jumlah diktendik dan peserta didik, tidak berdasarkan pada pengamatan pikiran; (2) Realisme natural ilmiah, yakni pengelolaan pendidikan hendaknya merujuk pada substansi apa adanya, hukum sebab akibat, dan aturan alam apa adanya, misalnya kebaikan akan dibalas kebaikan dan keburukan akan dibalas keburukan, tidak berdasarkan kreasi akal; (3) Neo-Realisme/harmoni, yakni pengelolaan pendidikan hendaknya demokratis dalam arti menghormati hak-hak manusia, misalnya melakukan musyawarah dan mufakat, tidak bertindak otoriter; dan (4) Realisme kritis, yakni pengelolaan pendidikan hendaknya mensintesis/mengintegrasikan/mempersatukan berbagai pandangan berbeda yang ada dalam aturan, budaya, pemangku kepentingan serta para ahli, misalnya sintesis pandangan empiris dan rasional, skeptis dan absolut, eudaemonis dan prutanis, agar menghasilkan pemikiran/pertimbangan yang kuat.

Dari pembahasan filosofis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan berbasis filsafat adalah pengaturan sumber daya pendidikan berpijak pada kajian alam dan makna kehidupan yang realistis, yang dilakukan dengan cara berpikir rasional, natural ilmiah, harmoni, dan kritis.

Pengelolaan Pendidikan Berbasis Psikologi

Secara etimologis, kata 'psikologi' dalam bahasa Inggris disebut *psychology* yang menurut *Oxford Learner's Dictionary* bermakna "*the scientific study of the mind and how it influences behavior*".²⁰

Dengan demikian, pengelolaan pendidikan adalah pengaturan lima sumber daya pendidikan berpijak pada kajian ilmiah pikiran dan perilaku manusia, termasuk produk pemikiran para ahli psikologi.

Diantara aliran psikologi yang cocok dijadikan pedoman pengelolaan pendidikan adalah aliran *Gestalt*.²¹ Kata *Gestalt* berasal dari bahasa Jerman yang diartikan sebagai bentuk, konfigurasi, atau keseluruhan, totalitas, hakikat. Dalam

¹⁹ Saiful, "Filsafat Idealisme Dan Realisme: Suatu Perspektif Pendidikan", Jurnal Mentari: Vol. 16 No. 2 (2013).

²⁰ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/psychology?q=psychology>

²¹ <https://dosenpsikologi.com/aliran-aliran-psikologi>

Bahasa Inggris disebut *pregnant* yang berarti hamil atau mengandung (total bay; jiwa dan raganya). Tokoh aliran Gestalt adalah Weitheimer, yang inti gagasannya adalah fenomena yang terjadi merupakan totalitas/keseluruhan kondisi dari proses fisiologis dan psikologis yang merupakan *natural science*. Keseluruhan batin yang mengatur atau mengorganisasikan keseluruhan sebagai suatu hal yang utama, sedangkan elemen kejiwaan lainnya merupakan faktor sekunder. Gejala-gejala psikis tertentu yang bersifat khusus merupakan totalitas yang menentukan tenaga batiniah dalam jiwa manusia. Kejiwaan dipandang sebagai hal yang harus dipelajari secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan ke dalam elemen elemen. Cara kerja aliran ini adalah dengan menganalisis unsur-unsur kejiwaan. Misalnya, kata 'bagus' bisa diartikan banyak makna seperti ketertiban, kesederhanaan, simetri, dan lain sebagainya yang kemudian merujuk pada prinsip yang lebih spesifik. Terdapat tiga cara yang digunakan aliran Gestalt, yaitu: (1) Instropeksi, yaitu sifat alamiah pada manusia berupa kemampuan menyadari sendiri apa yang telah dan sedang terjadi; (2) Eksperimentasi, yaitu melakukan praktek/uji coba bersama orang lain; dan (3) Komparatif, yaitu melakukan perbandingan.

Hasil penelitian Abdurrahman²² menyimpulkan bahwa pokok pandangan Gestalt adalah bahwa obyek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan. Kelebihan Teori Gestalt adalah: (1) Menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berfikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi (2) Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan *problem solving* seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan harian; (3) Peserta didik bisa aktif dan bisa menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator dan teman yang membuat situasi menjadi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dari peserta didik; (4) Siswa dengan mudah dapat mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri; (5) Siswa dapat dengan mudah berfikir tentang pengalamannya sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif; dan (6) Siswa mempunyai kesempatan untuk mencoba ide baru. Adapun kelemahan adalah pemahaman itu tidak dapat menjadi prototipe untuk sejumlah belajar yang biasa dilakukan manusia. Barangkali, pemahaman barulah terjadi kalau kita belajar dengan "pemecahan masalah", walaupun dalam kenyataannya, tidak semua hal merupakan masalah, boleh jadi hanya merupakan fakta atau prinsip.

Dalam konteks pengelolaan pendidikan, tiga metode aliran Gestalt di atas dapat diaplikasikan sebagai berikut: (1) Instropeksi, yakni dalam pengelolaan pendidikan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan hendaknya setiap pemangku kepentingan pendidikan (penyelenggara atau pengelolanyanya) selalu mawas diri yang sekarang dikenal dengan istilah evaluasi diri berkelanjutan; (2) Eksprerimen, yakni dalam pengelolaan pendidikan hendaknya memperbanyak praktek/unjuk kerja daripada teori; (3) Metode komparatif, yakni dalam pengelolaan pendidikan hendaknya melakukan perbandingan, seperti perbandingan peringkat

²² Abdurrahman, "Teori Belajar Aliran Psikologi Gestalt Serta Implikasinya Dalam Proses Belajar dan Pembelajaran" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

akreditasi prodi satu dengan prodi lainnya di internal dan eksternal lembaga, dalam rangka mengetahui persamaan dan perbedaannya untuk menentukan tindakan berikutnya.

Dari pembahasan psikologis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan berbasis psikologi adalah pengaturan sumber daya pendidikan berpijak pada kajian ilmiah pikiran dan perilaku manusia yang menyeluruh, yang dilakukan dengan cara introspeksi, eksperimen, dan komparasi.

Pengelolaan Pendidikan Berbasis Sosiologi

Secara etimologis, kata 'sosiologi' dalam bahasa Inggris disebut *sociology* yang menurut *Oxford Learner's Dictionary* berarti "*the scientific study of the nature and development of society and social behavior*".²³

Dengan demikian, pengelolaan pendidikan adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan lima sumber daya pendidikan berpijak pada kajian ilmiah kemasyarakatan, termasuk produk pemikiran para ahli sosiologi.

*Modernisme*²⁴ merupakan salah satu aliran sosiologi yang dapat dijadikan basis pengelolaan pendidikan. Tokoh-tokoh *Modernisme* adalah Jurgen Habermas, Anthony Giddens, dan Zygmund Baumann, dengan gagasan intinya adalah kita sedang berada di era modern. Modern dipahami sebagai kondisi kekinian yang mengalami proses pembaruan dan selalu berada dalam tahap kemajuan. *Modernisme* meyakini pada perkembangan sejarah yang linier, dari primitif menuju modern, dari keterbelakangan menuju kemajuan, dan membawa peradaban umat manusia pada era modern yang saat ini sering disebutnya sebagai era 'modernisme tingkat lanjut', 'modernitas sebagai proyek yang belum kelar', atau 'masyarakat resiko'. Singkatnya, menurut *Modernisme*, masyarakat modern yang berorientasi pada kemajuan selalu progresif, rasional, dan sadar. Untuk itu, bagi masyarakat modern, modernisasi atau pembaharuan segala aspek kehidupan, misalnya modernisasi infrastruktur, adalah suatu keniscayaan demi kehidupan yang lebih baik.

Dalam Jurnal Al Falah, Nurul Qomariah²⁵ menyimpulkan bahwa *modernism* sudah muncul di Indonesia melalui para kaum modernis sebagai reaksi terhadap kekentalan tradisional di Indonesia, yang dianggap tidak mampu memberikan perubahan pada masyarakat, baik ekonomi, sosial, pendidikan, politik serta mengakibatkan ketertinggalan dari negara lain. Kaum modernis di Indonesia lebih bercorak transendental, sebab menurut Syafi'i Ma'arif bahwa *modernism* (yang berdasarkan dirinya pada rasionalisme itu) telah gagal karena ia mengabaikan nilai-nilai transendental sebagai kehidupan. Akibatnya, dunia modern tidak memiliki pijakan yang kokoh dalam membangun peradaban.²⁶ Oleh sebab itu, sejarah mencatat bahwa kaum modernis Indonesia seperti Ahmad Dahlan berupaya memperjuangkan pendidikannya melalui Ormas Islam yang didirikannya yaitu Muhammadiyah yang

²³ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/sociology?q=sociology>

²⁴ <https://fis.unj.ac.id/labs/sosiologi/teori-utama-sosiologi/>

²⁵ Nurul Qomariah, "Pendidikan Islam Dan Aliran Filsafat Pendidikan Rekonstruksionisme", Jurnal Al Falah, Vol. XVII No. 32, 2017.

²⁶ Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006: 59).

identik dengan kelompok modernis. Memang pada awal abad ke-20, dunia pendidikan masih dikotomis antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, dimana lembaga pendidikan Islam tidak mempelajari pendidikan umum, begitu pula sebaliknya. Lebih parah lagi pendidikan Islam tidak stabil, seperti tidak memiliki visi, misi, yang serta tujuan jelas, terlebih lagi kalau dihubungkan dengan perkembangan masyarakat, dimana umat Islam berada dalam kemunduran yang diakibatkan oleh pendidikannya yang tradisional.

Dalam pengelolaan pendidikan, tiga cara pandang aliran *Modernisme* yang menghubungkan manusia dengan lingkungan sekitarnya pada zaman modern tersebut dapat dilakukan sebagai berikut: (1) progresif, dimana pengelolaan pendidikan, baik mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya diorientasikan untuk maju (*progress*) atau mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya dan menggunakan alat-alat/media terkini/terupdate demi dalam rangka efektivitas (berhasil guna/tepat sasaran) dan efisiensi (hemat biaya dan tenaga), misalnya penggunaan IT untuk kuliah daring/*online*, tidak lagi luring/*offline*; (2) rasional, dimana pengelolaan pendidikan direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi dengan pendekatan rasional/masuk akal/logis, tidak dengan pendekatan emosional, misalnya pemberian nilai peserta didik atau peringkat akreditasi tertentu betul-betul berdasarkan pertimbangan pemenuhan dan pelampauan SNP, bukan berdasarkan kedekatan keluarga, pertemanan atau emosi lainnya; dan (3) sadar, dimana pengelolaan pendidikan dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan keterpaksaan, misalnya para pemangku kepentingan pendidikan betul-betul menyadari bahwa kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan itu merupakan suatu kewajiban individu dan pertanggungjawaban sosial, tidak menganggapnya hanya sebatas pemenuhan kewajiban administratif kepada instansi di atasnya.

Dari pembahasan sosiologis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan berbasis sosiologi adalah pengaturan sumber daya pendidikan berpijak pada kajian ilmiah kemasyarakatan yang menghendaki kemajuan, yang dilakukan dengan cara pandang masyarakat yang progresif, rasional, dan sadar.

PENUTUP

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya pendidikan yang dengan: (1) berbasis agama berarti berpijak pada ajaran Tuhan yang mewajibkan pengaturan yang menyeluruh, dengan cara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang tepat dan akurat; (2) berbasis filsafat berarti berpijak pada kajian alam dan makna kehidupan yang realistis, dengan cara berpikir rasional, natural ilmiah, harmoni, dan kritis; (3) berbasis psikologi berarti berpijak pada kajian ilmiah pikiran dan perilaku manusia yang menyeluruh, dengan cara introspeksi, eksperimen, dan komparasi; dan (4) berbasis sosiologi berarti berpijak pada kajian ilmiah kemasyarakatan yang menghendaki kemajuan, yang dilakukan dengan cara pandang masyarakat yang progresif, rasional, dan sadar.

Berdasarkan hasil penelitian ini, para pemangku kepentingan pendidikan seperti pemegang kebijakan pendidikan, praktisi pendidikan, dan peneliti pendidikan lainnya, hendaknya mengelola pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai kaidah kebenaran yang tak terbantahkan dalam agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, "Teori Belajar Aliran Psikologi Gestalt Serta Implikasinya Dalam Proses Belajar dan Pembelajaran" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)
- Al Mighwar, Muhammad, "Penyusunan Dan Penyesuaian Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)": 36. Tersedia online: https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/157
- Al Mighwar, Muhammad, *Kepemimpinan Kiai Dalam Pengelolaan Pondok Pesantren Modern (Studi Historis Kepemimpinan K.H. Imam Zarkasyi Di Pondok Modern Darussalam Gontor)* (Bandung: Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Disertasi 2021: 108-109).
- Alawiyah, Faridah, "Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah", *Jurnal Aspirasi* Vol. 8 No. 1, Juni 2017.
<https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/sistem-pendidikan-nasional-dan-permasalahannya/>
- <https://dosenpsikologi.com/aliran-aliran-psikologi>
- <https://fis.unj.ac.id/labs/sosiologi/teori-utama-sosiologi/>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Pendidikan#cite_note-21
- https://www.kompasiana.com/heryizkak7272/5e0eb672d541df4d837854f3/beberapa-masalah-besar-dalam-dunia-pendidikan-di-indonesia?page=all&page_images=1
- <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/>
- Maranting, Halik S., dkk, "Implementasi Standar Nasional Pendidikan Dalam Meningkatkan Daya Saing Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Gorontalo, "TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 8, Nomor 2 : Agustus 2020.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi. Aksara, 1999);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Qomariah, Nurul, "Pendidikan Islam Dan Aliran Filsafat Pendidikan Rekonstruksionisme ", *Jurnal Al Falah*, Vol. XVII No. 32, 2017.
- Saiful, "Filsafat Idealisme Dan Realisme: Suatu Perspektif Pendidikan", *Jurnal Mentari*: Vol. 16 No. 2 (2013).
- Sallis, Edward , *Total Quality Management in Education* (Routledge, 2000: 24).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2005).
- Tafsir, Ahmad, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006: 59).
- Thbrani, Abdul Muiz, *Filsafat Dalam Pendidikan* (Jember: IAIN Jember Press, 2015: 93).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003
- Zenab, Siti, "Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah Dasar", *Jurnal Menata: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Vol. 4 No. 1 (2021).